

Pengaruh *Financial Technology* terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada 34 Provinsi di Indonesia Periode 2020-2022

Amalia Risti Rahayu*, Ade Yunita Mafruhah

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*amaliaristii07@gmail.com, ade.yunita.mafruhah@unisba.ac.id

Abstract. This study aims to find out how the development of financial technology and local own-source revenue, and to find out how financial technology affects regionally-generated income in provinces in Indonesia for the 2020-2022 period. The factors tested in this study are financial technology as the independent variable, while local revenue is the dependent variable. The research method used in this research is descriptive and verification method. The population in this study are provinces in Indonesia for the 2020-2022 period, totaling 34 companies. The sampling technique used in this study is non-probability sampling with saturated sampling technique. The data analysis used was panel data regression analysis using Eviews 10. The results showed that financial technology had a positive and significant effect on regional original income. In addition, the magnitude of the influence of financial technology on local revenue is 91.1%.

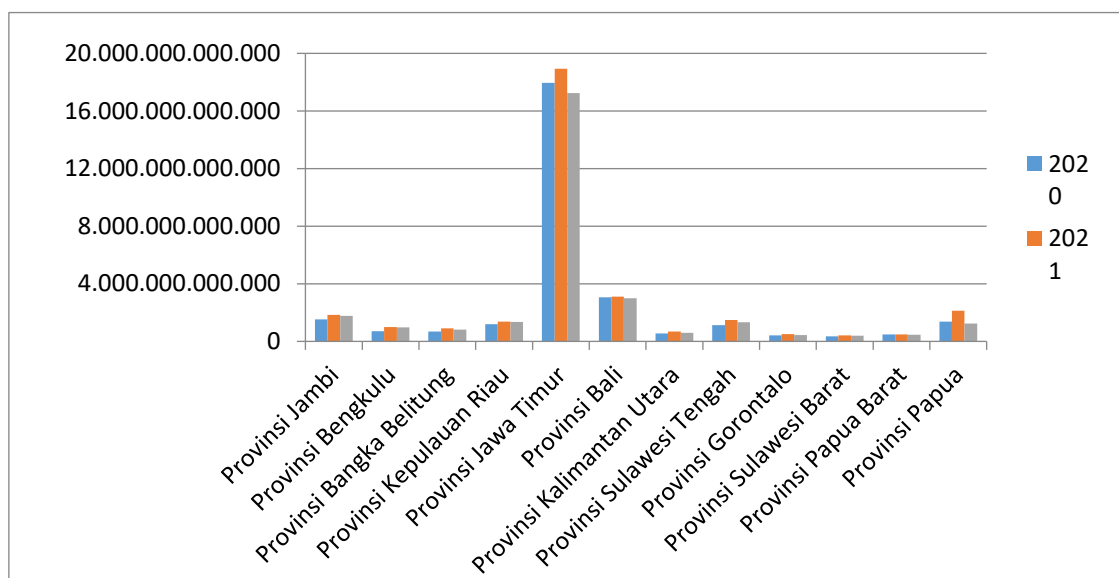
Keywords: *Financial Technology and Regional Original Income.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan *financial technology* dan pendapatan asli daerah, serta untuk mengetahui bagaimana pengaruh *financial technology* terhadap pendapatan asli daerah pada Provinsi di Indonesia periode 2020-2022. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah *financial technology* sebagai variabel independen, sedangkan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi di Indonesia periode 2020-2022 yang berjumlah 34 perusahaan. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan teknik *sampling jenuh*. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel menggunakan *Eviews 10*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial technology* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu besarnya pengaruh *financial technology* terhadap pendapatan asli daerah sebesar 91,1%.

Kata Kunci: *Financial Technology dan Pendapatan Asli Daerah.*

A. Pendahuluan

Pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999) sebagai titik awal adanya otonomi daerah (Peraturan Pemerintah RI, 2015). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi daerah berimplikasi terhadap kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku (Siregar, 2017). Sumber pendapatan asli terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Firdausy, 2018). Pada kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang belum optimal dalam mengelola sumber daya daerah terlihat dari adanya penurunan pendapatan asli daerah. Di bawah ini akan disajikan data penurunan pendapatan asli daerah pada beberapa daerah Provinsi di Indonesia periode 2020-2022 yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Data Pendapatan Asli Daerah Pada Provinsi Di Indonesia Periode 2020-2022

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa pada Tahun 2020-2021 beberapa Provinsi di atas menunjukkan adanya peningkatan pendapatan asli daerah, hanya Provinsi Papua Barat yang menunjukkan adanya penurunan pendapatan asli daerah. Sementara pada tahun 2021-2022 ke-12 Provinsi di atas menunjukkan adanya penurunan pendapatan asli daerah. Provinsi Papua Barat dalam hal ini merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang menunjukkan adanya penurunan pendapatan asli daerah secara berturut-turut selama periode 2020-2022. Hal ini karena Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih tergolong sebagai daerah terpencil dan kurang berkembang. Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan akses internet menjadi kendala utama dalam pengembangan *fintech* di Papua Barat. Beberapa wilayah di Papua Barat masih terisolasi dan sulit dijangkau, sehingga menyulitkan penyediaan layanan *fintech* dan pemahaman masyarakat terhadap layanan tersebut. Selain itu, Tingkat literasi keuangan di Papua Barat masih tergolong rendah. Hal ini mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap layanan *fintech* dan efektivitas penggunaannya. Sehingga, sulit bagi *fintech* untuk berkembang dan memberikan dampak yang signifikan terhadap

pendapatan asli daerah di Papua Barat. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa masih belum optimalnya Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia dalam mengelola sumber daya daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah yaitu pertumbuhan *financial technology* (*fintech*) di suatu daerah

Financial Technology menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 adalah penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran (Peraturan BI, 2017).

Fintech lahir dan berkembang sesuai tuntutan zaman dan pasar ekonomi, dimana proses pembayaran, transfer, jual beli, hingga pembiayaan diharapkan menjadi semakin praktis, aman dan modern. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/ PBI 2017 Tentang Teknologi Finansial pada Pasal 3 juga menyebutkan bahwa *financial technology* (teknologi finansial) dapat dikategorikan dalam 1) Sistem pembayaran; 2) Pendukung pasar; 3) Manajemen investasi dan manajemen risiko; 4) Pinjaman, pembiayaan, penyediaan modal; dan 5) Jasa finansial lainnya (Peraturan BI, 2017).



Gambar 2. Bisnis *Fintech* di Indonesia

Fintech merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi (Maria et al., 2021). Pendapat lain mengenai pengertian *fintech* dikemukakan oleh Suryono et al., (2016) tentang *Financial Technology*, yaitu perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern. *Financial technology* sebagai sebuah ekosistem tidak hanya terdiri dari perusahaan *startup*. *Fintech* pembayaran merupakan jenis yang paling berkembang di Indonesia yaitu sebesar 39%, *fintech lending* yang termasuk didalamnya adalah *fintech peer to peer* (P2P) yaitu sebesar 24%, selanjutnya *fintech* jenis agregator yaitu se besar 11%, dan *fintech* jenis *crowdfunding* yaitu sebesar 8%.

Direktur Kebijakan Publik Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) Ajisatria Suleiman mengatakan saat ini sudah ada 235 penyelenggara *fintech* yang terdaftar. Pemain dalam sistem pembayaran yang mendominasi sekitar 39%, namun jumlah pemain P2P *lending* yang tumbuh paling pesat. Bila tahun 2016 pelakunya tumbuh 16% maka pada tahun 2017 tumbuh 32%. Pemain P2P *lending* bertambah sejak OJK meluncurkan aturan P2P *lending* (CNBC, 2018). Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) diharapkan akan ada pertumbuhan industri LPMUBTI atau *fintech peer to peer* (P2P) *lending* sebagai alternatif sumber pembiayaan baru bagi masyarakat selain dari jasa keuangan konvensional (Peraturan OJK, 2016).

Pengguna *peer to peer lending* berasal dari kalangan UMKM yang mana mereka adalah bagian dari masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank karena diharuskan memiliki agunan, maka *peer to peer (P2P) lending* adalah solusi. Dampak dari adanya investasi yang masuk dalam bidang *fintech* dan kegiatan penyaluran dana oleh *fintech* akan mendorong kenaikan pendapatan pada semua institusi ekonomi, yakni rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah daerah/pusat (Wajuba et al., 2021). Melalui kemudahan pinjaman atau pembiayaan dalam mencari modal usaha, akan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya, serta meningkatkan roda perekonomian di suatu daerah pada umumnya. Tingginya tingkat perekonomian suatu daerah akan berdampak pada tingginya pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Muchlis, 2018). Oleh karena itu semakin tinggi pertumbuhan *fintech* di suatu daerah, maka semakin tinggi pendapatan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi perkembangan *Financial Technology* pada 34 Provinsi di Indonesia periode 2020-2022?
2. Bagaimana kondisi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada 34 Provinsi di Indonesia periode 2020-2022?
3. Bagaimana pengaruh *Financial Technology* terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 34 Provinsi di Indonesia periode 2020-2022?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi perkembangan *Financial Technology* pada 34 Provinsi di Indonesia periode 2020-2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada 34 Provinsi di Indonesia periode 2020-2022.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Financial Technology* terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 34 Provinsi di Indonesia periode 2020-2022.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 Provinsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis Analisis multivariat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi data panel dengan menggunakan *Software Eviews 10*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel 1 Regresi Data Panel

Dependent Variable: PENDAPATAN_ASLI_DAERAH				
Method: Panel Least Squares				
Date: 04/07/23 Time: 21:07				
Sample: 2020 2022				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 34				
Total panel (balanced) observations: 102				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.243406	0.245421	5.066412	0.0000
FINANCIAL_TECHNOLOGY	0.866748	0.027070	32.01851	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10

Model persamaan regresi yang terbentuk berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

$$Y = 1,243406 + 0,866748 X + e$$

Jika nilai konstanta sebesar 1,243406 artinya apabila variabel independen yaitu variabel

yaitu *financial technology*, dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu variabel pendapatan asli daerah akan bernilai sebesar 1,243406.

Jika nilai koefisien regresi variabel *financial technology* menunjukkan sebesar 0,866748, artinya apabila variabel *financial technology* mengalami peningkatan sebesar (satu) satuan, dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu variabel pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,866748. Tanda positif pada nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa *financial technology* memiliki arah pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Artinya semakin tinggi *financial technology* maka semakin tinggi pendapatan asli daerah, begitupun sebaliknya.

Tabel 2. Pengujian Hipotesis

Dependent Variable: PENDAPATAN_ASLI_DAERAH				
Method: Panel Least Squares				
Date: 04/07/23 Time: 21:07				
Sample: 2020 2022				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 34				
Total panel (balanced) observations: 102				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.243406	0.245421	5.066412	0.0000
FINANCIAL_TECHNOLOGY	0.866748	0.027070	32.01851	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10

Berdasarkan pengujian hipotesis dapat dilihat jika nilai probabilitas variabel *financial technology* sebesar $0,0000 < 0,05$. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} sebesar 32,018, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,984. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $32,018 > 1,984$, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel *financial technology* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah.

Tabel 3. Koefisien Determinasi

R-squared	0.911126	Mean dependent var	9.045069
Adjusted R-squared	0.910237	S.D. dependent var	0.989123
S.E. of regression	0.296346	Akaike info criterion	0.424835
Sum squared resid	8.782099	Schwarz criterion	0.476305
Log likelihood	-19.66661	Hannan-Quinn criter.	0.445677
F-statistic	1025.185	Durbin-Watson stat	1.815177
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai *R-squared* (R^2) sebesar 0,911 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu *financial technology* dalam penelitian ini adalah sebesar 91,1%, sedangkan sisanya sebesar 8,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Berdasarkan hasil uji t (parsial) variabel *financial technology* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terhadap pendapatan asli daerah. Nilai koefisien dari variabel ini 0,866748 artinya jika terjadi kenaikan *financial technology* sebanyak 1 persen maka akan menurunkan tingkat pendapatan asli daerah sebesar 866.748 ribu rupiah. Begitupun sebaliknya, jika terjadi penurunan tingkat *financial technology* sebanyak 1 persen maka akan meningkatkan tingkat pendapatan asli daerah sebesar 866.748 ribu rupiah. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal bahwa *financial technology* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu hasil penelitian ini sesuai dengan yang sebelumnya pernah diteliti oleh (Verihubs, 2022; Alfaris et al., 2019; Muchlis, 2018; As'adi & Sularsih, 2022).

Pada kasus di Indonesia pada tahun 2020-2021 beberapa ada 12 Provinsi diantaranya: Provinsi Jambi; Provinsi Bengkulu; Provinsi Kepulauan Riau; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Bali; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Sulawesi Tengah; Provinsi Gorontalo; Provinsi Sulawesi Barat; Provinsi Papua; dan Provinsi Papua Barat yang menunjukkan adanya peningkatan pendapatan asli daerah, namun hanya Provinsi Papua Barat yang menunjukkan adanya penurunan pendapatan asli daerah. Sementara pada tahun 2021-2022 ke-12 Provinsi menunjukkan adanya penurunan pendapatan asli daerah. Provinsi Papua Barat merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang menunjukkan adanya penurunan pendapatan asli daerah secara berturut-turut selama periode 2020-2022. Hal ini karena Papua Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang masih tergolong sebagai daerah terpencil dan kurang berkembang. Hal ini menjadi faktor utama mengapa provinsi Papua Barat mengalami penurunan pada tahun 2020-2022. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Provinsi Papua Barat mengalami penurunan, antara lain:

1. Keterbatasan akses internet dan infrastruktur telekomunikasi. Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan akses internet menjadi kendala utama dalam pengembangan *fintech* di Papua Barat. Beberapa wilayah di Papua Barat masih terisolasi dan sulit dijangkau, sehingga menyulitkan penyediaan layanan *fintech* dan pemahaman masyarakat terhadap layanan tersebut.
2. Tingkat literasi keuangan di Papua Barat masih tergolong rendah. Hal ini mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap layanan *fintech* dan efektivitas penggunaannya. Sehingga, sulit bagi *fintech* untuk berkembang dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Papua Barat.
3. Belum adanya regulasi yang mendukung dan mengatur kegiatan *fintech* di Papua Barat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengaruh *fintech* terhadap pendapatan asli daerah di Papua Barat masih terbatas.
4. Keterbatasan modal usaha menjadi kendala bagi pengembangan industri *fintech* di Papua Barat. Hal ini membuat *fintech* kesulitan untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan memperluas layanan yang ditawarkan.
5. Adanya preferensi masyarakat terhadap cara pembayaran tradisional. Beberapa masyarakat di Papua Barat masih memilih cara pembayaran yang tradisional seperti menggunakan uang tunai atau barter. Hal ini menjadi kendala dalam pengembangan *fintech* dan mempengaruhi pengaruh *fintech* terhadap pendapatan asli daerah di Papua Barat.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa masih belum optimalnya Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia dalam mengelola sumber daya daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Meningkatkan inklusi keuangan masyarakat itu berarti bahwa semakin banyak masyarakat yang akses terhadap lembaga keuangan, yang memanfaatkan produk-produk keuangan maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pada akhirnya akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. Secara teori seharusnya dengan pemberian kredit memberikan kemudahan kepada masyarakat atau para pengusaha kecil untuk mengembangkan usaha sampai mencapai kesuksesan yang diinginkan sehingga meningkatkan kesejahteraan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat (Sari & Saraswati, 2019).

Semakin tinggi perkembangan *fintech* akan berdampak juga terhadap aktivitas keuangan di setiap daerah. Perkembangan *fintech* memudahkan masyarakat di daerah dalam melakukan berbagai transaksi keuangan secara digital, sehingga lebih mudah dalam melakukan sistem pembayaran secara digital. Selain itu *fintech* juga memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mencari alternatif pinjaman atau pembiayaan dalam mencari modal usaha khususnya selain dari lembaga keuangan konvensional. Melalui kemudahan pinjaman atau pembiayaan dalam mencari modal usaha, akan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya, serta meningkatkan roda perekonomian di suatu daerah pada umumnya. Tingginya tingkat perekonomian suatu daerah akan berdampak pada tingginya pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu semakin tinggi pertumbuhan *fintech* di suatu daerah, maka semakin tinggi pendapatan asli daerah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata *financial technology* pada 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 155.902.554.218.280. Pada tahun 2021 menjadi sebesar 295.852.677.308. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 528.006.328.262.983. Dilihat dari peningkatan tersebut artinya pertumbuhan *financial technology* khususnya *peer to peer (P2P) lending* di setiap Provinsi di Indonesia mengalami peningkatan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pendapatan asli daerah pada 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan nilai rata-rata pendapatan asli daerah sebesar 148.710.876.245.000. Pada tahun 2021 nilai rata-rata pendapatan asli daerah mengalami peningkatan menjadi sebesar 166.453.448.026.433. Pada tahun 2022 nilai rata-rata pendapatan asli daerah mengalami peningkatan menjadi sebesar 187.547.397.835.210. Artinya kinerja pemerintah daerah Provinsi dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya daerah sudah berjalan optimal terlihat dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial technology* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Semakin tinggi pertumbuhan *fintech* di suatu daerah, maka semakin tinggi pendapatan asli daerah.

Acknowledge

Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi yang selalu memberikan kasih sayang, doa yang tulus, dan memberikan semangat yang luar biasa hingga detik ini. Terimakasih banyak atas pengorbanan serta kesabaran yang luar biasa dalam membimbing penulis.
2. Dr. Ima Amaliah, S.E., M.Si selaku Dosen Wali sekaligus Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan yang selalu memberikan motivasi, materi, arahan serta dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ade Yunita Mafruhat, S.E. M.Soc., Sc. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dengan sabar dan mengarahkan serta memberikan bimbingan pengetahuan dan pengalaman. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan selama perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi, serta bantuannya.

Daftar Pustaka

- [1] Alfari, M. R., Mursida, M. W., Irfan, M., & Syahroni, D. (2019). Maulana Reyza Alfari 1, Muhammad Waliyam Mursida 2, Moch. Irfan Dwi Syahroni 3. *Legislatif*, 3(1), 73–96.
- [2] As'adi, & Sularsih, H. (2022). Transformasi digital dan financial technology terhadap peningkatan pendapatan UMKM dimasa pandemi Covid- 19 di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3), 683–694.
- [3] Maria, E., Halim, A., & Luthfan, M. (2021). Dana Perimbangan Dan Pembangunan Manusia: Sebuah Bukti Pengujian Dari Pulau Kalimantan. *Journal of Applied Business*, 7(3), 306–324.
- [4] Sari, A. R., & Saraswati, B. D. (2019). Analisis pengaruh fintech p2p lending dan kredit bank umum terhadap ketimpangan pendapatan. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 1(1), 1–15. <https://ejournal.uksw.edu/dekat/article/view/4718>

- [5] Siregar, B. (2017). Akuntansi sektor publik (akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual).
- [6] Suryono, B., Ngumar, S., & Riduwan, A. (2016). Hermeneutics study of the existence of regulatory Indonesia cooperative effort. 4, 26–35.
- [7] Wajuba, L., Fisabilillah, P., & Hanifa, N. (2021). Analisis Pengaruh Fintech Lending Terhadap Perekonomian Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation*, 1(3), 2721–8287.
- [8] Abie Rachman Muhamad, & Dewi Rahmi. (2023). Pengaruh Teknologi, Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat 2007-2021. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 45–52. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1924>
- [9] Kekalih, M. W., Studi Manajemen, P., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2019). Laporan Akhir Preferensi UMKM terhadap Penggunaan Fintech: Pendekatan Hierarchy of Effects Model.
- [10] Rani Wulantari, Haviz, M., & Mafruhah, A. Y. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat 2003-2017. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 8–14. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.62>
- [11] Arfid Fathun Nadyan, & Dewi Rahmi. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Religiositas, Persepsi, dan Media Informasi Terhadap Minat Investor Melakukan Wakaf Saham. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 53–60. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1926>
- [12] Billi Anidiatama Rahmawan, & Ade Yunita Mafruhah. (2023). Pengaruh Cryptocurrency terhadap Aktivitas Ekonomi: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 61–68. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1974>
- [13] Iqbal Salsabil, & Westi Rianti. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 – 2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 15–24. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1886>